

LAPORAN

SPM BIDANG KESEHATAN

SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



1. Pelayanan kesehatan ibu hamil



4. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir



7. Pelayanan kesehatan balita



10. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar



2. Pelayanan kesehatan pada usia produktif



5. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut



8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi



11. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus



3. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat



6. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis



9. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV



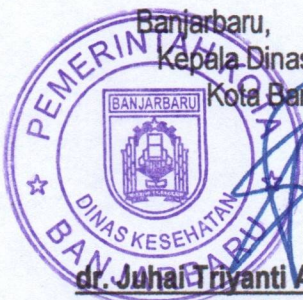
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarbaru Tahun 2023 ini dapat terselesaikan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan acuan dalam penerapan pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan kepada masyarakat beserta sistematika Laporan Standar Pelayanan Minimal untuk Pemerintah Daerah.

Laporan Standar Pelayanan Minimal ini tersusun atas kerjasama tim yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran baik di seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan SPM ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penerapan SPM bidang kesehatan di Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Banjarbaru



dr. Juha Triyanti Agustina, M. MKes
Pembina Utama Muda / IV c
NIP.19740818 200604 2 025

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kebijakan Umum	3
D. Arah Kebijakan	4
BAB II PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN	5
BAB III PENCAPAIAN SPM	13
1. Jenis Pelayanan Dasar	13
2. Target Pencapaian SPM	14
3. Anggaran	15
4. Dukungan Personil	16
5. Hasil Capaian	17
6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	19
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	24
A. Bidang Urusan Kesehatan	24
BAB V PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Perhitungan kebutuhan SDM kesehatan untuk pelayanan dasar	5
2.	Perhitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, Dan Perlengkapan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan	9
3.	Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal	14
4.	Program/Kegiatan Yang Mendanai Kegiatan SPM Bidang Kesehatan di Kota Banjarbaru Tahun 2023	15
5.	Realisasi capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023	17
6.	Realisasi capaian Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023	18
7.	Kendala, Permasalahan, dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Di Kota Banjarbaru Tahun 2023	19
8.	Indikator dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah RI nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketetapan sasaran. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas salah satunya adalah urusan bidang kesehatan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.

Pelayanan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2019 mengamanatkan target-target SPM lebih merupakan kinerja Pemerintah Daerah dan menjadi penilaian kinerja Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara.

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan ke enam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi, yaitu (i) memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*.

B. Dasar Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023.

C. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Banjarbaru **“MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi. Diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Banjarbaru menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. Arah Kebijakan

Dari rumusan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dapat Visi Pemerintah Kota Banjarbaru, yaitu “**MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA**”.

- **MAJU** : Adalah Komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan Segala Potensi
- **AGAMIS** : Adalah terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang Agamis, Berakhlak Mulia dan berbudi pekerti luhur
- **SEJAHTERA** : Adalah sumber daya manusia yang berkualitas menumbuhkan kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintahan yang baik

Dengan misi :

- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
- Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Amanah

BAB II

PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN

Dalam tahap penerapan SPM bidang kesehatan terdiri dari Pengumpulan data, Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Empat tahapan penerapan SPM tersebut dituangkan sebagaimana lampiran tabel dibawah ini.

Tabel.1

Perhitungan kebutuhan SDM kesehatan untuk pelayanan dasar

No.	Jenis layanan dasar	Jenis SDM Kesehatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Keterangan
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1. Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	6	6	0	100%
		2. Bidan	152	152	0	100%
		3. Perawat	110	110	0	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1. Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	6	6	0	100%
		2. Bidan	152	152	0	100%
		3. Perawat	110	110	0	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Dokter/ Dokter Spesialis Anak	41	41	0	100%
		2. Bidan	152	152	0	100%
		3. Perawat	110	110	0	100%

Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis layanan dasar	Jenis SDM Kesehatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Keterangan
4.	Pelayanan kesehatan Balita	1. Dokter	41	41	0	100%
		2. Bidan	152	152	0	100%
		3. Perawat	110	110	0	100%
		4. Ahli Gizi	34	34	0	100%
		5. Kader Kesehatan	78	78	0	100%
		6. Guru PAUD	328	328	0	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1. Dokter/ Dokter gigi	60	60	0	100%
		2. Bidan	152	152	0	100%
		3. Perawat	110	110	0	100%
		4. Ahli Gizi	34	34	0	100%
		5. Tenaga Kesehatan Masyarakat	47	47	0	100%
		6. Kader Kesehatan	78	78	0	100%
		7. Guru	67	67	0	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1. Dokter	36	36	0	100%
		2. Bidan	101	101	0	100%
		3. Perawat	87	87	0	100%
		4. Ahli Gizi	24	24	0	100%
		5. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	0	100%
		6. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	214	214	0	100%
		7. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	200	200	0	100%

No.	Jenis layanan dasar	Jenis SDM Kesehatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Keterangan
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1. Dokter	41	41	0	100%
		1. Bidan	152	152	0	100%
		2. Perawat	110	110	0	100%
		3. Ahli Gizi	34	34	0	100%
		4. Tenaga Kesehatan Masyarakat	47	47	0	100%
		5. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	200	200	0	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1. Dokter	20	20	0	100%
		2. Bidan	20	20	0	100%
		3. Perawat	20	20	0	100%
		4. Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	20	0	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	1. Dokter	20	20	0	100%
		2. Bidan	20	20	0	100%
		3. Perawat	20	20	0	100%
		4. Ahli Gizi	20	20	0	100%
		5. Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	20	0	100%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1. Dokter	10	10	0	100%
		2. Perawat	10	10	0	100%
		3. Tenaga Kesehatan lainnya	10	10	0	100%

Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis layanan dasar	Jenis SDM Kesehatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia	Selisih	Keterangan
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	1. Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Paru	19	19	0	100%
		2. Perawat	36	36	0	100%
		3. Analis Teknik Laboratorium Medik	19	19	0	100%
		4. Penata Rontgen	9	9	0	100%
		5. Tenaga Kesehatan Masyarakat	9	9	0	100%
		6. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	125	125	0	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	1. Dokter	10	10	0	100%
		2. Perawat	10	10	0	100%
		3. Bidan	10	10	0	100%
		4. Ahli Teknologi Laboratorium Medis	10	10	0	100%
		5. Tenaga Kesehatan Masyarakat	10	10	0	100%
		6. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	10	10	0	100%

Tabel.2

**Perhitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, Dan
Perlengkapan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan**

No.	Jenis Layanan Dasar	Barang	Jumlah Kebutuhan	Jumlah tersedia	Selisih	Harga Satuan	Biaya
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1. Vaksin Tenanus Difteri (Td)	5206	4259	947		
		2. Tablet Tambah darah	468540	425250	43290		
		3. Alat deteksi resiko ibu hamil, Test kehamilan, Pemeriksaan Gol.darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	5206	4725	481		
		4. Kartu ibu/rekam medis	5206	4725	481		
		5. Buku kesehatan ibu dan Anak (KIA)	5206	4725	481		
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1. Formulir Partograf	4970	4605	365		
		2. Kartu ibu (rekam medis)	4970	4605	365		
		3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4970	4605	365		
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Vaksin Hepatitis B0	4733	4616	117		
		2. Vitamin K1 Injeksi	4733	4483	250		
		3. Salep/tetes mata antibiotic	4733	4483	250		
		4. Formulir bayi baru lahir	4733	4733	0		
		5. Formulir MTBM	4733	4733	0		
		6. Buku KIA	4733	4733	0		

Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis Layanan Dasar	Barang	Jumlah Kebutuhan	Jumlah tersedia	Selisih	Harga Satuan	Biaya
4.	Pelayanan kesehatan Balita	1. KPSP	18715	16508	2207		
		2. Formulir DDTK	18715	18715	0		
		3. Buku KIA	18715	18715	0		
		4. Vitamin A Biru	4878	4878	0		
		5. Vitamin A Merah	56145	56145	0		
		6. Vaksin imunisasi lanjutan:Campak, Rubella	789	670	119		
		7. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib	1183	826	357		
		8. Vaksin Imunisasi Dasar HBO	4733	4616	117		
		9. Vaksin Imunisasi Dasar BCG	1183	1164	19		
		10.Vaksin Imunisasi Dasar Polio	4733	4658	75		
		11.Vaksin Imunisasi Dasar IPV	1183	1109	74		
		12.Vaksin Imunisasi Dasar DPT-HB-Hib	1183	1105	33		
		13.Vaksin Imunisasi Dasar Campak	789	789	0		
		14.Vaksin Imunisasi Dasar Rubella	789	679	110		
		15.Jarum Suntik dan bahan habis pakai	4733	4733	0		
		16.Peralatan Anafilaktik	10	10	0		
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1. Buku raport kesehatanku	43851	43851	0		
		2. Buku pemantauan kesehatan	43851	43851	0		
		3. Kuesioner skrining kesehatan	43851	43851	0		
		4. Formulir	43851	43851	0		

No.	Jenis Layanan Dasar	Barang	Jumlah yang harus Dilayani/Di penuhi	Jumlah tersedia	Selisih	Harga Satuan	Biaya
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1. Pedoman KIE	23	23	0		
		2. Alat Ukur Berat Badan	40	40	0		
		3. Alat ukur tinggi badan	38	38	0		
		4. Alat ukur lingkar perut	39	39	0		
		5. Tensimeter	47	47	0		
		6. Glukometer	39	39	0		
		7. Tes strip gula darah,lancet, kapas alcohol,Form ulir	188919	188919	0		
		8. KIT IVA Tes	10	10	0		
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1. Strip uji pemeriksaan gula darah,koleste rol	26319	12635	13684		
		2. Instrumen GDS, AMT, ADL, P3G	26319	26319	0		
		3. Buku kesehatan lansia	26319	26319	0		
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan KI	10	10			
		2. Tensimeter	20	20			
		3. Formulir SIPTM	70663	70663	0		
		4. Obat HT	1 paket	1 paket	0		

No.	Jenis Layanan Dasar	Barang	Jumlah yang harus Dilayani/Di penuhi	Jumlah tersedia	Selisih	Harga Satuan	Biaya
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. Glukometer	20	20	0		
		2. Strip Tes Gula Darah,Kapas alcohol,lancet	4914	4409	505		
		3. Formulir	4914	4914	0		
		4. KIE	20	20	0		
10.	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1. Buku pedoman	10	10	0		
		2. Formulir	420	420	0		
		3. Alat Fiksasi	1	1	0		
		4. KIE	10	10	0		
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. KIE	10	10	0		
		2. Reagen Zn TB	117	117	0		
		3. Pot Dahak,kaca slide, Bahan Habis Pakai,Formulir, Masker	4222	4222	0		
		4. Catridge tes cepat molekuler	1700	1700	0		
		5. SOP	19	19	0		
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Tubuh manusia (HIV)	1. KIE	10	10	0		
		2. Tes Cepat HIV	7604	7604	0		
		3. Bahan Medis Habis Pakai	7604	7604	0		
		4. Rekam Medis	7604	7604	0		

BAB III

PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar bidang kesehatan pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru adalah:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.
Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah warga negara penderita terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan yang mendukung dan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 ada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 4.
Program/Kegiatan Yang Mendanai Kegiatan SPM Bidang Kesehatan di Kota Banjarbaru
Tahun 2023

No.	Indikator SPM	Anggaran
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	852.136.000,-
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	42.200.000,-
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	33.402.250,-
4.	Pelayanan kesehatan Balita	499.476.000,-
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	329.075.000,-
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	184.950.000,-
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	226.230.750,-
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	18.954.000,-
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	20.079.000,-
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	57.550.000,-
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	242.499.000,-
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	93.060.000,-
Total		2.599.612.900,-

4. Dukungan Personil

Personil/sumber daya manusia kesehatan yang dapat mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1.	Keperawatan	:	110	Orang
2.	Kesehatan Masyarakat	:	59	Orang
3.	Gizi	:	34	Orang
4.	Teknik Biomedika	:	41	Orang
5.	Medis	:	57	Orang
6.	Kebidanan	:	152	Orang
7.	Kefarmasian	:	43	Orang
8.	Kesehatan Lingkungan	:	34	Orang
9.	Keteknisian Medis	:	34	Orang
10.	Gizi (Asiten tenaga kesehatan)	:	2	Orang
11.	Tenaga Penunjang (Dukungan Manajemen)	:	186	Orang
12.	Tenaga Penunjang (Struktural)	:	16	Orang
13.	Nakes lainnya	:	26	Orang

*Sumber: Dokumen Deskriptif Sumber Daya Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023

5. Hasil Capaian

Hasil pencapaian SPM tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sebagai berikut :

Tabel 5.

Realisasi capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET		REALISASI	
		OBSULUT	%	OBSULUT	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	5206	100%	4725	90,76%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	4970	100%	4605	92,66%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4733	100%	4483	94,72%
4.	Pelayanan kesehatan Balita	18715	100%	16508	88,21%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	43851	100%	43851	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	188919	100%	62854	33,27%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	26319	100%	12635	48,01%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	70663	100%	15282	21,63%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	4914	100%	4436	90,27%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	402	100%	402	100%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	4405	100%	3737	84,84%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	7604	100%	7604	100%

Tabel 6.

Realisasi Capaian Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET		REALISASI	
		OBSULUT	%	OBSULUT	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	852.136.000,-	100 %	717.495.000,-	84,20%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	42.200.000,-	100 %	17.500.000,-	41,47%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	33.402.250,-	100 %	31.602.250,-	94,61%
4.	Pelayanan kesehatan Balita	499.476.000,-	100 %	335.413.950,-	67,15%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	329.075.000,-	100 %	278.175.000,-	84,53%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	184.950.000,-	100 %	167.778.000,-	90,72%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	226.230.750,-	100 %	191.850.750,-	84,80%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	18.954.000,-	100 %	18.954.000,-	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	20.079.000,-	100 %	19.328.000,-	96,26%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	57.550.000,-	100 %	53.375.000,-	92,75%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	242.499.000,-	100 %	173.549.100,-	71,57%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	93.060.000,-	100 %	84.745.000,-	91,06%

Kendala, Permasalahan Dan Solusi

Dalam penerapan SPM bidang kesehatan yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru tentunya ada beberapa permasalahan yang ditemukan sebagai berikut :

Tabel 7.
Kendala, Permasalahan, dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Di Kota Banjarbaru Tahun 2023

No.	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Masih terbatasnya anggaran terkait pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar. - Dokter terlatih penggunaan USG masih kurang - Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan ibu hamil masih kurang optimal - Pelaporan K6 masih belum optimal	- Mengusulkan penambahan anggaran kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar - Mengusulkan pelatihan Usg bagi dokter puskesmas - Membuat MOU/PKS dengan Fasilitas kesehatan/klinik swasta untuk peningkatan capaian pelaporan pelayanan ibu hamil sesuai standar - Peningkatan Kapasitas bagi petugas
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Masih terbatasnya anggaran terkait pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar - Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan ibu bersalin masih kurang optimal.	- Mengusulkan penambahan anggaran kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar. - Membuat MOU/PKS dengan Fasilitas kesehatan/klinik swasta untuk peningkatan capaian pelaporan pelayanan ibu hamil sesuai standar.
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Masih terbatasnya anggaran terkait pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. - Masih rendahnya ASI eksklusif pada bayi < 6 bulan. - Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir.	- Mengusulkan penambahan anggaran kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir baru lahir sesuai standar. - Mengusulkan kegiatan kapasitas konselor ASI Eksklusif. - Membuat MOU/PKS dengan Fasilitas kesehatan/klinik swasta untuk peningkatan capaian pelaporan pelayanan ibu hamil sesuai standar

No.	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	- Masih terbatasnya anggaran terkait pelayanan kesehatan balita sesuai standar. - Masih rendahnya kesadaran orang tua untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang balita sampai usia 5 tahun. - Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan pada balita.	- Mengusulkan penambahan anggaran kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir baru lahir sesuai standar. - Pendataan tempat penitipan anak, untuk memantau balita yang ada di penitipan. - Membuat MOU/PKS dengan Fasilitas kesehatan/klinik swasta untuk peningkatan capaian pelaporan pelayanan balita sesuai standar.
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- Masih terbatasnya anggaran terkait pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar. - Pelaksanaan kegiatan penjangkaran Anak sekolah tidak serempak dilekaskanakan.sehingga pelaporan kurang optimal. - Kurangnya SDM terlatih pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Usia pendidikan Dasar	- Mengusulkan penambahan anggaran kegiatan pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai standar. - Pertemuan dengan pengelola program Usia Pendidikan Dasar se kota banjarbaru mengenai jadwal pelaksanaan penjangkaran anak sekolah. - Mengusulkan pelatihan /peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan.
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Kurangnya kesadaran masyarakat, ASN dan Non ASN melakukan deteksi dini PTM minimal 1 (satu) tahun sekali. - Masih rendahnya kunjungan masyarakat pada hari pelayanan Posbindu PTM. - Belum optimalnya layanan Pandu PTM di Puskesmas, sehingga belum sesuai algoritma pandu PTM. - Belum terdatanya layanan skrining PTM di Fasyankes swasta karena belum optimalnya kemitraan jejaring ditingkat puskesmas - Kurangnya peran lintas sektor dalam pergerakan masyarakat.	- Melakukan Advokasi pada pengambil kebijakan dengan diterbitkannya Surat edaran kewajiban pada ASN dan Non ASN dalam melakukan skrining PTM memperluas cakupan DD PTM pada karyawan FKTP Rujukan dan jejaring baik DPM/DPS, Dokter Keluarga dan klinik pratama. - Membuat draft sebagai salah satu syarat kenaikan gaji berkala apabila telah melakukan DDPTM ditandai adanya sertifikat yang dikeluarkan puskesmas melalui goggle form. - Berkoordinasi dengan lintas Program dan Lintas Sektor terkait sehingga kegiatan Skrining PTM bisa saling terintegrasi.

No.	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Masih terbatasnya anggaran terkait pelayanan kesehatan lansia sesuai standar. - Kurangnya SDM terlatih pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut. - Pencatatan dan pelaporan lansia masih belum terlaporkan semua.	- Mengusulkan penambahan anggaran kegiatan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar. - Peningkatan Kapasitas bagi Nakes. - Membuat MOU/PKS dengan fasilitas kesehatan/klinik swasta untuk peningkatan capaian pelaporan pelayanan lansia sesuai standar.
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Kurangnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya secara rutin melakukan cek ke puskesmas penderita merasa dirinya sehat (tidak ada gejala yang tampak). - Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pengobatan hipertensi karena persepsi yang masih keliru dalam pengobatan hipertensi. - Kurangnya pengetahuan masyarakat akan risiko komplikasi hipertensi. - Belum terlaporkannya secara maksimal hasil pelayanan hipertensi di fasyankes swasta karena masih belum optimalnya kemitraan jejaring puskesmas. -	- Melakukan Advokasi pada pengambilan kebijakan dengan diterbitkannya surat edaran kewajiban pada ASN dan Non ASN dalam melakukan Skrining PTM memperluas cakupan DD PTM pada karyawan FKTP rujukan dan jejaring baik DPM/DPS, Dokter Keluarga dan Klinik Pratama. - Membuat draft sebagai salah satu syarat kenaikan gaji berkala apabila telah melakukan DDPTM ditandai adanya Sertifikat yang dikeluarkan Puskesmas melalui goggle form - Berkoordinasi dengan lintas Program dan lintas sektor terkait sehingga kegiatan skrining PTM bisasaling terintegrasi.
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Hambatan dalam layanan UBM di Puskesmas antara lain kurangnya minat untuk mengikuti program layanan Konseling UBM	- Melakukan Advokasi pada pengambilan kebijakan dengan diterbitkannya surat edaran kewajiban pada ASN dan Non ASN dalam melakukan Skrining PTM memperluas cakupan DD PTM pada karyawan FKTP rujukan dan jejaring baik DPM/DPS, Dokter Keluarga dan Klinik Pratama. - Membuat draft sebagai salah satu syarat kenaikan

No.	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
			berkala apabila telah melakukan DDPTM ditandai adanya Sertifikat yang dikeluarkan Puskesmas melalui goggle form - Berkoordinasi dengan lintas Program dan lintas sektor terkait sehingga kegiatan skrining PTM bisa saling terintegrasi
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	- Kurangnya kesadaran masyarakat terutama keluarga ODGJ akan pentingnya melakukan kunjungan rujukan ke fasyankes untuk mendapatkan obat - Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perlunya deteksi dini kesehatan jiwa - Sulitnya merubah stigma masyarakat terhadap penderita odgj sehingga banyak terjadi pembiaran terhadap kasus ODGJ di masyarakat	- Melakukan pendampingan pada puskesmas dan penguatan TIM TPKJM terhadap permasalahan ODGJ di lapangan dan Koordinasi dengan pihak kecamatan - Memberikan OJT laporan dengan Web Simkeswa dan Skrining Keswa dan Napza dengan aplikasi Sijiwa kepada pengelola Keswa Puskesmas diharapkan laporan dapat disampaikan tepat waktu - Terpenuhinya data Pelayanan IPWL hanya 1 buah yaitu Puskesmas Cempaka pelayanan berupa konseling dan intervensi yang lebih privasi serta KIE penderita dalam binaan BNN Kota Banjarbaru
11.	Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberkulosis	- Terduga TB masih banyak yang belum mau periksa ke Puskesmas padahal sudah diedukasi oleh petugas kesehatan - Upaya investigasi kontak pada kasus yang masih belum maksimal oleh petugas - Peran kader TB belum maksimal dalam membantu petugas kesehatan dalam penemuan terduga TB dan membawanya ke Fasyankes - Tinggi stigma dan deskriminasi terhadap pasien TB kurangnya sosialisasi dan penyuluhan	- Petugas melakukan kunjungan kerumah terduga dan meminta untuk periksa pemeriksaan penunjang / dahak/TCM - Melakukan Investigasi kontak terhadap semua kasus TB yang diobati untuk mendapatkan terduga baru - Melakukan kegiatan orientasi kader TB dan pertemuan rutin setiap triwulan - Mengurangi Stigma dan diskriminasi dengan rutin dan melakukan kunjungan rumah

No.	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
		terhadap penyakit TB oleh petugas/kader kepada masyarakat	- dengan pendekatan persuasif - Menganggarkan kegiatan untuk penyuluhan/ sosialisasi penyakit TB di masyarakat dan menganggarkan insentif kader jika menemukan terduga TB dan membawanya ke Fasyankes untuk periksa
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	- Sulitnya menjangkau pemeriksaan/deteksi dini dalam populasi kunci (WPS,LSL dan Waria) - Pasien yang sudah mengetahui statusnya ODHIV sebagian menolak atau putus berobat	- Kerjasama dengan lintas sector terkait dan memperdayakan kader yang sudah mendapat pengetahuan tentang HIV

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

A. Bidang Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang mendukung dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota dan di laksanakan dalam 12 Sub kegiatan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Tabel 8.

Indikator dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar oleh Kab/ Kota	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota)
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar oleh Kab/ Kota	4 Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota)
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota)
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
		6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota)
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
		7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota)
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
		8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota)
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota)
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar oleh Kab/ Kota	10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota)
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
		11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota)
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota)
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah suatu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara agar dapat hidup layak. Salah satu kebutuhan dasar yang melekat adalah pada pelayanan dasar urusan kesehatan.

Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan memberikan pelayanan dasar dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan secara maksimal kepada masyarakat sesuai dengan visinya **“Maju Agamis, Dan Sejahtera”**.

Dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan di tahun 2022 capaian SPM Bidang Kesehatan di tahun 2022 ada 2 indikator SPM yang mencapai 100 % yaitu Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV). Capaian rata-rata SPM Bidang Kesehatan tahun 2022 sebesar 69.87%. Sedangkan Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 ada 3 indikator SPM yang mencapai 100% yaitu Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV). Capaian rata-rata SPM tahun 2023 sebesar 78.69%. Untuk capaian SPM Bangda tahun 2022 capaian SPM 71,03% (Tuntas Pratama), sedangkan untuk tahun 2023 capaian SPM naik 82,53% (Tuntas Madya).